



Tersedia online di  
<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/akuntabilitas>  
  
<https://doi.org/10.35457/xxx>



## Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Keuangan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo Periode 2020

Dyah Ayu Perwitasari <sup>1</sup>, Trivosa Aprilia Novadiani Haidiputri <sup>2</sup>,  
Mutimmah Rustinawati <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Ekonomi Universitas Panca Marga Probolinggo

Email: <sup>1</sup> dyahayu@upm.ac.id, <sup>2</sup> putrivosa@upm.ac.id, <sup>3</sup> mutimmah@upm.ac.id

### ABSTRAK

**Kata kunci:** Efektivitas, Efisiensi, Anggaran

**Keywords:** Effectiveness, Efficiency, Budget

**Style APA dalam mensitasi artikel ini:**  
Dyah Ayu Purwitasari, Trivosa Aprilia Novadiani Haidiputri, Mutimmah Rustinawati, (2022). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Keuangan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo Periode 2020, *Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu- Ilmu Ekonomi*, 15 (2), 40-51

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran keuangan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo berdasarkan pagu anggaran dan realisasi anggaran periode 2020. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran keuangan pengelolaan keuangan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo periode 2020 yaitu : 1)Tingkat efektivitas pendapatan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo periode Anggaran 2020 yaitu sebesar 114% sehingga dikategorikan sangat efektif karena lebih dari 100%. Sehingga Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo dapat dikatakan dalam merealisasi anggaran pendapatan terhadap target anggaran yang ditentukan 2)Tingkat efisiensi belanja pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo periode Anggaran 2020 yaitu sebesar 96,92% dan dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo dapat dikatakan kurang efisien dalam merealisasi anggaran belanjanya. Namun, pada dasarnya kurang efisiennya realisasi anggaran belanja di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo

### ABSTRACT

*This research aims to determine the level of effectiveness and efficiency of absorption of the financial budget at the Department of Agriculture, Food Security and Fisheries in the City of Probolinggo based on the budget ceiling and budget realization for the 2020 period. The method used in this research uses quantitative descriptive. The results showed that the level of effectiveness and efficiency in absorption of the financial management financial budget at the Department of Agriculture, Food Security and Fisheries of the City of Probolinggo for the 2020 period is as follows: 1) The level of effectiveness of income at the Office of Agriculture, Food Security and Fisheries of the City of*



---

*Probolinggo in the 2020 Fiscal Year is equal to 114% and categorized as very effective because it exceeds 100%. So that it can be said that the Department of Agriculture, Food Security and Fisheries of the City of Probolinggo has succeeded in realizing revenue with a predetermined budget. 2) The efficiency ratio for spending at the Department of Agriculture, Food Security and Fisheries for the City of Probolinggo in the 2020 Fiscal Year is 96.92% and is categorized as less efficient because it exceeds 90%. So that it can be said that the Department of Agriculture, Food Security and Fisheries of the City of Probolinggo can be said to be less efficient in realizing its budget. However, basically the inefficient realization of the expenditure budget at the Agriculture, Food Security and Fisheries Office of the City of Probolinggo is due to the calculation of the financial allocations used to finance development and organizational activities of the regional apparatus so that services to the community can be carried out optimally.*

## PENDAHULUAN

Di Indonesia akuntansi sektor publik di Indonesia mulai berkembang pesat setelah diberlakukannya kebijakan tentang otonomi daerah di era reformasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangannya secara tertib, efektif, efisien serta transparan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku demi terwujudnya *good governance*. Di Indonesia otonomi daerah diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah serta UU No.33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam hal mengelola keuangannya termasuk menyusun sebuah anggaran.

Di dalam sektor publik, anggaran disajikan dalam bentuk suatu dokumen yang menginterpretasikan kondisi keuangan entitas publik yang berisikan informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Dalam menyusun rencana anggaran suatu daerah otonom, tahap pertama yang dilakukan Pemerintah daerah adalah tahap perencanaan anggaran yang disajikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan utama dalam pembuatan APBD pada anggaran Pemerintah daerah yaitu sebagai pedoman dalam hal penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan program atau kegiatan pemerintahan yang hendak dilaksanakan, serta mengetahui bagaimana proses perealisasi anggaran yang telah

ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Pengeluaran kas dan beban APBD yang dilakukan pemerintah daerah merupakan bentuk dari perealisasi APBD berdasarkan anggaran yang sudah dibuat sebelumnya dan nantinya akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

LRA merupakan laporan yang menyajikan informasi keuangan yang meliputi realisasi pendapatan, belanja serta biaya dari organisasi sektor publik yang nantinya dikomparasikan dengan ke-3 anggaran pos tersebut (Mahsun,dkk, 2013: 120). LRA juga berisikan informasi kepada para pengguna laporan mengenai keefektifan dan keefisienan anggaran berdasarkan faktor perolehan dan penggunaan anggarannya telah dilakukan.

Menurut Mahmudi (2016: 21) "Efektivitas yaitu hasil perbandingan antara target dengan hasil yang dicapai sesungguhnya". Efektivitas digunakan untuk mengukur pendapatan suatu entitas dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi menurut Mahmudi (2016: 164) "Efisiensi yaitu perbandingan realisasi anggaran dengan rencana anggaran yang ditetapkan sebelumnya untuk mengetahui tingkat penghematan anggaran belanja pemerintah". Segala sesuatu dapat dikatakan efisien baik organisasi ataupun program kerjanya, jika dapat menghasilkan output yang maksimal dengan input seminimal mungkin.

Kota Probolinggo merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan otonomi daerah. Untuk menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo dibantu oleh organisasi perangkat daerah salah satunya yaitu Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo (DISPERTAHANKAN). DISPERTAHANKAN merupakan organisasi perangkat daerah hasil penggabungan antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Dinas Perikanan Kota Probolinggo yang dibentuk berdasarkan Perwali Kota Probolinggo, No.187 Tahun 2019. Dalam menjalankan kegiatan dan program-programnya DISPERTAHANKAN Kota Probolinggo memakai dana yang didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Probolinggo. Dana tersebut harus dikelola seoptimal mungkin sehingga dapat dipertanggungjawabkan melalui Laporan Realiasi Anggaran (LRA). Dalam menyusun dan merealisasi anggarannya DISPERTAHANKAN Kota Probolinggo perlu mentransparasi hal

tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai secara langsung kinerjanya baik dalam hal ketepatan dalam pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran, serta hasil kerja yang dicapai.

Pada penelitian sebelumnya oleh (Kasmiyanti dan Mapparenta, 2019), yang melakukan analisis kinerja pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada periode 2011-2015. Yang menunjukkan bahwa pada sisi efektivitas kinerja pengelolaan keuangan dapat dikategorikan cukup efektif dengan nilai efektifitasnya 93,89%. Sedangkan pada sisi efisiensi pengelolaan keuangan dapat dikategori efisien, dengan nilai efisiensinya sebesar 15,39%.

Kemudian pada penelitian selanjutnya oleh (Posuma, Masinambow dan Walewangko, 2020) yang melakukan analisis tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman periode 2017- 2019. Yang menunjukkan bahwa pada sisi efektivitas pengelolaan keuangan setiap triwulan mengalami fluktuasi, tetapi cenderung baik selama peridode 2017-2019 dan dapat dikatakan efektif pada umumnya. Sedangkan pada sisi efisiensi pengelolaan keuangan setiap triwulan juga mengalami fluktuasi yang cenderung baik pada periode 2017-2019 sehingga dapat dikatakan efisien pada umumnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa analisis terhadap Laporan Realiasasi Anggaran (LRA) sangat penting bagi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo sehingga mendorong penulis untuk menganalisis Laporan Realiasasi Anggaran (LRA) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo agar dapat mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran keuangan pada organisasi perangkat daerah tersebut.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, yakni menguraikan data yang dikumpulkan dengan teori-teori yang relevan dengan menggunakan analisis laporan keuangan pemerintahan dengan2 (dua) rasio antara lain :

1. Rasio Efektivitas, yang dapat diperoleh melalui perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}}{\text{Target penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100 \%$$

Dengan kategori nilai efektivitasnya sebagai berikut

**Tabel 1**  
**Kategori Nilai Efektivitas Kinerja Keuangan**

Persentase	Kategori
Lebih dari 100 %	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

Data yang digunakan untuk menghitung rasio efektivitas pada penelitian ini yaitu data realisasi penerimaan PAD serta data target penerimaan PAD DISPERTAHANKAN Kota Probolinggo.

2. Rasio Efisiensi, yang dapat diperoleh dengan melakukan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

**Tabel 2**  
**Kategori Nilai Efisiensi Kinerja Keuangan**

Persentase	Kategori
Lebih dari 100 %	Tidak Efisien
90 % - 100 %	Kurang Efisien
80 % - 90 %	Cukup Efisien
60 % - 80 %	Efisien
Kurang dari 60 %	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

Data yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi pada penelitian ini yaitu data realisasi belanja serta data pagu anggaran belanja DISPERTAHANKAN Kota Probolinggo.

## PEMBAHASAN

Berikut data Laporan realisasi anggaran yang peneliti dapatkan dari DISPERTAHANKAN Kota Probolinggo yang kemudian akan dianalisis

**Tabel 3**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PROBOLINGGO**  
**Tahun Anggaran 2020**  
**(Dalam Rupiah)**

NO	Uraian	Jumlah		Lebih/Kurang	%
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6 = 4 : 3
<b>4</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>				
41	Pendapatan Asli Daerah	1.894.902.250,00	2.160.208.700,99	265.306.450,99	114,00
412	Hasil Retribusi Daerah	836.202.250,00	956.444.895,00	120.242.645,00	114,00
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.058.700.000,00	1.203.763.805,99	145.063.805,99	113,70
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.894.902.250,00</b>	<b>2.160.208.700,99</b>	<b>265.306.450,99</b>	<b>114,00</b>
<b>5</b>	<b>Belanja</b>				
51	Belanja Tidak Langsung	9.456.386.869,50	9.382.220.424,00	(74.166.445,50)	99,22
511	Belanja Pegawai	9.456.386.869,50	9.382.220.424,00	(74.166.445,50)	99,22
52	Belanja Langsung	7.350.104.023,00	6.906.588.427,00	(443.515.596,00)	93,97
521	Belanja Pegawai	342.207.500,00	318.372.500,00	(23.835.000,00)	93,03
522	Belanja Barang dan Jasa	6.959.396.523,00	6.539.969.927,00	(419.426.596,00)	93,97
523	Belanja Modal	48.500.000,00	48.246.000,00	(254.000,00)	99,48
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16.806.490.892,50</b>	<b>16.288.808.851,00</b>	<b>(517.682.041,50)</b>	<b>96,92</b>
	<b>Surplus/ (Defisit)</b>	<b>(14.911.588.642,50)</b>	<b>(14.128.600.150,01)</b>	<b>782.988.492,49</b>	<b>94,75</b>

menggunakan Rasio Efektivitas dan Efisiensi :

### Hasil Rasio Efektivitas

Berdasarkan LRA diatas, maka perhitungan rasio efektivitas keuangan DISPERTAHANKAN tahun anggaran 2020 :

**Tabel 4**  
**Rasio Efektivitas Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan**  
**Kota Probolinggo**  
**Tahun Anggaran 2020**  
**(Dalam Rupiah)**

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio Efektivitas	Kategori
2020	2.160.208.700,99	1.894.902.250,00	114 %	Sangat Efektif

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo (Data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas DISPERTAHANKAN Kota Probolinggo periode 2020, anggaran pendapatan daerah sebesar Rp. 1.894.902.250,00 dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 2.160.208.700,99 yang selisih anggarannya sebesar Rp. 265.306.450,99. sehingga didapatkan nilai rasio efektivitas sebesar 114,00

% dan dapat dikategorikan sangat efektif karena tingkat persentase lebih dari 100 %.

### Hasil Rasio Efisiensi

Berdasarkan LRA diatas, maka perhitungan rasio efisiensi keuangan DISPERTAHANKAN tahun anggaran 2020 :



**Tabel 5**  
**Rasio Efisiensi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Probolinggo**  
**Tahun Anggaran 2020**  
**(Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Realisasi Belanja</b>	<b>Anggaran Belanja</b>	<b>Rasio Efisiensi</b>	<b>Kategori</b>
<b>2020</b>	<b>Belanja</b>				
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>9.382.220.424,00</b>	<b>9.456.386.869,50</b>	<b>99,22 %</b>	<b>Kurang Efisien</b>
	Belanja Pegawai	9.382.220.424,00	9.456.386.869,50	99,22 %	Kurang Efisien
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>6.906.588.427,00</b>	<b>7.350.104.023,00</b>	<b>93,97 %</b>	<b>Kurang Efisien</b>
	Belanja Pegawai	318.372.500,00	342.207.500,00	93,03 %	Kurang Efisien
	Belanja Barang dan Jasa	6.539.969.927,00	6.959.396.523,00	93,97 %	Kurang Efisien
	Belanja Modal	48.246.000,00	48.500.000,00	99,48 %	Kurang Efisien
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16.288.808.851,00</b>	<b>16.806.490.892,50</b>	<b>96,92 %</b>	<b>Kurang Efisien</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo (Data diolah)

Hasil perhitungan Rasio Efisiensi DISPERTAHANKAN Kota Probolinggo tahun anggaran 2020, dari jumlah pagu anggaran belanja sebesar Rp. 16.806.490.892,50 dan jumlah realisasi belanja sebesar Rp. 16.288.808.851,00. Dengan selisih sebesar Rp. 517.682.041,50. sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar 96,92% dan dapat dikategorikan kurang efisien karena lebih dari 90%. Hal ini terjadinya karena kesalahan dalam proses perencanaan anggaran tahun 2020 yang disebabkan oleh perubahan sistem penatausahaan keuangan akibat adanya penggabungan (merger) urusan pemerintahan dalam 1 (satu) dinas, dan berdampak kepada minimnya waktu pelaksanaan penyerapan anggaran perubahan tahun 2020 sehingga menyebabkan adanya beberapa program dan kegiatan yang seakan dipaksakan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi anggaran DISPERTAHANKAN Kota Probolinggo. Untuk pagu anggaran belanja tidak langsung yang hanya terdiri dari anggaran belanja pegawai yaitu sebesar Rp. 9.456.386.869,50 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 9.382.220.424,00. Selisih pagu anggaran dan realisasinya sebesar Rp. 74.166.445,50. Dengan demikian

diperoleh rasio efisiensi sebesar 99,22 % sehingga dapat dikategorikan kurang efisien karena lebih dari 90 %

Selanjutnya, untuk hasil perhitungan rasio efisiensi anggaran belanja langsung DISPERTAHANKAN Kota Probolinggo. Untuk pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.350.104.023,00 dan realisasinya sebesar Rp. 6.906.588.427,00. Selisih pagu anggaran dan realisasinya sebesar Rp. 443.515.596,00. sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar 93,97 % dan dapat dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90 %.

Berikut rincian pagu anggaran belanja langsung beserta realiasinya yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Target : Rp. 342.207.500,00

Realiasasi : Rp. 318.372.500,00

Selisih : Rp. 23.835.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Target : Rp. 6.959.396.523,00

Realiasasi : Rp. 6.539.969.927,00

Selisih : Rp. 419.426.596,00

c. Belanja Modal

Target : Rp. 48.500.000,00

Realiasasi : Rp. 48.246.000,00

Selisih : Rp. 254.000,00

Dari rincian diatas untuk anggaran belanja pegawai mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 342.207.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 318.372.500,00. Selisih pagu anggaran dan realisasinya sebesar Rp. 74.166.445,50. Sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar 93,03 % dan dapat dikategorikan kurang efisien karena lebih dari 90

%. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah pegawai di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo karena adanya

penggabungan urusan pemerintahan dalam 1 (satu) dinas sehingga anggaran yang diserap juga ikut bertambah.

Untuk anggaran barang dan jasa mempunyai pagu anggaran sebesar Rp 6.959.396.523,00 dan realisasinya sebesar Rp.6.539.969.927,00. Selisih pagu anggaran dan realisasinya sebesar Rp. 419.426.596,00. Sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar 93,97 % dan dapat dikategorikan kurang efisien karena lebih dari 90 %. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah bidang kerja pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo karena adanya penggabungan urusan pemerintahan dalam 1 (satu) dinas dan menyebabkan bertambahnya program kerja atau kegiatan sehingga anggaran yang diserap juga ikut bertambah.

Untuk anggaran barang dan jasa mempunyai pagu anggaran sebesar Rp 48.500.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 48.246.000,00. Selisih pagu anggaran dan realisasinya sebesar Rp. 254.000,00. Sehingga 78 diperoleh rasio efisiensi sebesar 99,49 % dapat dikategorikan kurang efisien karena lebih dari 90 %. Hal ini terjadi karena bertambahnya sarana dan prasarana pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo untuk menunjang kegiatan pelayanan masyarakat.

Dengan demikian untuk periode Anggaran 2020 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo dapat dikatakan kurang efisien dalam merealisasikan anggaran belanjanya sehingga hampir mencapai pagu anggaran yang sudah dianggarkan sebelumnya. Namun, pada dasarnya kurang efisiennya realisasi anggaran belanja pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo disebabkan oleh perhitungan alokasi anggaran yang dipergunakan dalam membiayai pembangunan dan aktivitas organisasi perangkat daerah tersebut agar pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan maksimal

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas dan efisiensi dengan menggunakan

LRA Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan rasio efektivitas pendapatan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo periode Anggaran 2020 yaitu sebesar 114 % sehingga dapat dikategorikan sangat efektif karena lebih dari 100 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo berhasil dalam melakukan realisasi pendapatan terhadap anggaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo periode Anggaran 2020 yaitu sebesar 96,92% dan dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo dapat kurang efisien dalam merealisasi anggaran belanjanya. Namun, pada dasarnya kurang efisiennya realisasi anggaran belanja pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo disebabkan oleh perhitungan alokasi anggaran yang dipergunakan dalam membiayai pembangunan dan aktivitas organisasi perangkat daerah tersebut agar pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan maksimal

### **SARAN**

Berikut saran yang dapat disampaikan oleh peneliti, yaitu :

1. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo sebaiknya meningkatkan tingkat efektivitas dan mengoptimalkan retribusinya pada periode yang akan datang dengan melaksanakan perencanaan dalam memenuhi target anggaran yang nantinya ditetapkan guna tetap mempertahankan kriteria yang sangat efektif.
2. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo sebaiknya merasionalkan belanja dengan melakukan evaluasi program kegiatan periode sebelumnya agar dalam perencanaan belanja pada periode berikutnya tidak terdapat selisih yang begitu besar antara rencana anggaran dengan realisasi anggaran.

3. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo sebaiknya perlu mengkaji mengenai sektor produktif dengan sektor yang kurang produktif sehingga dapat mengarahkan kebijakan umum anggaran pada program program prioritas sehingga anggaran yang dikeluarkan dapat terealisasi dengan efektif serta efisien

## DAFTAR PUSTAKA

- Kasmiyanti, S., Mapparenta. (2019). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. *YUME : Journal of Management*, 2(3), 128-139
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII
- PRESS Mahsun, M. dkk. 2013. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 187 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kota Probolinggo
- Posuma, L., Masinambow, V., Walewangko, E. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. 21(3), 32-43.